

PERAN TRANSPARANSI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK: STUDI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH

THE ROLE OF DIGITAL TRANSPARENCY IN IMPROVING PUBLIC ACCOUNTABILITY: A STUDY OF PUBLIC INFORMATION MANAGEMENT ON OFFICIAL LOCAL GOVERNMENT WEBSITES

I Nyoman Ade Saputra^{1*}, Raihan A. Hanasi^{2*}, Sri Rosdiyanti Dalila, Deswita Maharani Poluan, Citra Wati Yunus, Refais Andrean Korompot

Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Gorontalo, 96128

*E-mail koresponden: ¹adejr83@gmail.com; ²raihan@ung.ac.id

disubmit: 19 Mei 2026, direvisi: 11 Juni 2026, diterima: 29 Juni 2026

ABSTRAK

Penggunaan situs web resmi pemerintah daerah sebagai saluran pengungkapan informasi publik merupakan salah satu cara kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi digital tata kelola pemerintahan. Karena tingginya penggunaan internet di Indonesia, pemerintah daerah harus membuat informasi publik mudah diakses, cepat, dan transparan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan pengungkapan informasi publik berbasis digital, termasuk pembaruan informasi yang kurang memadai, manajemen situs web yang tidak konsisten, dan kurangnya layanan komunikasi publik yang interaktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana manajemen informasi publik pada situs web resmi pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas publik melalui transparansi digital. Penelitian ini menggabungkan teknik deskriptif dengan metodologi kualitatif. Observasi situs web pemerintah daerah, dokumen, dan tinjauan pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari paradigma interaktif yang digunakan dalam analisis data. Temuan menunjukkan pentingnya transparansi digital melalui situs web pemerintah daerah dalam mempromosikan pengungkapan informasi publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Situs web yang dikelola oleh pemerintah daerah telah digunakan untuk menyebarkan informasi tentang layanan publik, laporan kegiatan pemerintah, dan program pemerintah. Namun, karena pengaruh manajemen informasi publik yang buruk, kurangnya sumber daya manusia, dan optimalisasi fitur komunikasi publik yang kurang baik, penerapan transparansi digital belum berjalan secara optimal. Studi ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk menangani informasi publik secara terbuka, akurat, dan berkelanjutan sama pentingnya dengan keberadaan situs web pemerintah daerah bagi keberhasilan transparansi digital.

Kata kunci: Transparansi Digital, Akuntabilitas Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Website Pemerintah Daerah, E-government

ABSTRACT

The use of official local government websites as a channel for disclosing public information is one way that the advancement of information and communication technology has fueled the digital

Saputra, I N. A. R. A. Hanasi, Sri Rosdiyanti Dalila, Deswita Maharani Poluan, Citra Wati Yunus, Refais Andrean Korompot (202x). JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 08(02), page 65 – 77. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.387>

© The Author(s)



Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

transformation of governance. Due to Indonesia's high internet usage, local governments must make public information readily available, quick, and transparent in order to uphold the values of public accountability and good governance. However, there are still a number of challenges to the adoption of digital-based public information disclosure, including subpar information updates, inconsistent website management, and a lack of interactive public communication services. The purpose of this study is to examine how public information management on official local government websites can enhance public accountability through digital transparency. This study combines descriptive techniques with a qualitative methodology. Observation of local government websites, paperwork, and literature reviews were used as data gathering methods. Data reduction, data display, and conclusion drawing are all part of the interactive paradigm used in data analysis. The findings demonstrate the importance of digital transparency via local government websites in promoting public information disclosure and enhancing local government accountability. Websites run by local governments have been used to disseminate information about public services, government activity reports, and government programs. However, due to the influence of poor public information management, a lack of human resources, and poor public communication feature optimization, the deployment of digital transparency has not been operating at its best. This study suggests that the government's commitment to handling public information in an open, accurate, and sustainable manner is just as important to the success of digital transparency as the presence of a local government website.

Keywords: *Digital Transparency, Public Accountability, Public Information Disclosure, Local Government Website, E-government*

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam perkembangan informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan penting terhadap tata kelola pemerintahan. Pergerakan menuju perubahan digital mendorong pemerintah untuk merevisi pendekatan pelayanan publik mereka. Contoh praktis digitalisasi pemerintahan ini dapat diamati dalam pengoperasian situs web resmi pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai platform untuk mendistribusikan informasi publik kepada warga negara.

Peningkatan penggunaan internet di seluruh Indonesia secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan akan layanan pemerintah yang berbasis online. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2024), bahwa pada tahun 2024, Indonesia akan memiliki sekitar 221,5 juta pengguna

internet, yang mewakili sekitar 79,5% dari seluruh populasi. Tingkat akses internet yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin beralih ke saluran digital untuk mendapatkan informasi, termasuk detail terkait pemerintah dan layanan publik. Akibatnya, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa informasi publik mudah diakses, cepat, dan jelas melalui platform digital, terutama melalui situs web resmi pemerintah daerah.

Dalam tata kelola pemerintahan kontemporer, keterbukaan informasi publik merupakan konsep fundamental yang penting untuk mencapai administrasi yang akuntabel dan demokratis. Transparansi ini memungkinkan individu untuk memperoleh berbagai jenis detail mengenai kebijakan pemerintah, inisiatif, layanan publik, dan pengawasan keuangan.

Di Indonesia, kejelasan informasi publik diatur oleh UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Transparansi Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengakses informasi publik, dan bahwa badan publik wajib menyampaikan informasi secara cepat, benar, dan dengan cara yang mudah diakses oleh publik. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan sistem informasi publik digital, termasuk pengembangan situs web resmi untuk pemerintah daerah.

Situs web resmi pemerintah daerah berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar masyarakat tetap terinformasi, memungkinkan orang mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu hadir di tempat atau waktu tertentu. Pemerintah daerah dapat membagikan berbagai jenis informasi penting melalui saluran resmi ini, seperti rencana pembangunan, laporan keuangan, layanan publik, perubahan kebijakan, dan laporan tentang kinerja pemerintah. Situs web pemerintah daerah menawarkan transparansi digital, yang merupakan bagian dari bagaimana strategi e-government dijalankan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat yang dilayaninya.

Menurut temuan dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 Komisi Informasi Pusat, skor nasional Indonesia untuk keterbukaan informasi publik berada di angka 75,65, masih diklasifikasikan sebagai "sedang". Ini menunjukkan sedikit peningkatan dari skor tahun sebelumnya sebesar 75,40, namun menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Adapun untuk ukuran transparansi, skor nasional tercatat hanya 72,18, sedangkan aspek dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi publik mendapat peringkat 69,37. Selain itu, skor untuk penyediaan informasi yang akurat, andal, dan terkini hanya 75,62. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tantangan masih ada dalam pengelolaan informasi publik, terutama terkait pembaruan informasi dan standar layanan digital terkait informasi.

Gagasan keterbukaan dalam manajemen pemerintahan sangat terkait dengan gagasan tata kelola yang efektif. Seperti yang dinyatakan oleh, United Nations Development Programme (1997), keterbukaan merupakan elemen penting dari tata kelola yang efektif karena memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses bebas terhadap informasi pemerintah. Membangun transparansi secara efektif dapat mendorong keterlibatan warga yang lebih besar dalam

memantau kegiatan pemerintah sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah pada publik.

Keterbukaan digital sangat berkaitan dengan tanggung jawab warga negara. Gagasan tanggung jawab warga negara dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka kerja yang diusulkan oleh Mark Bovens (2007), yang berpendapat bahwa tanggung jawab ada sebagai hubungan antara aktor pemerintah dan ruang publik, di mana aktor-aktor ini diharuskan untuk memberikan informasi, klarifikasi, dan justifikasi atas tindakan mereka. Dari sudut pandang ini, situs web milik pemerintah daerah dapat dipandang sebagai saluran yang menghubungkan entitas pemerintah dengan warga negara sekaligus menyebarkan informasi dan memastikan akuntabilitas publik. Semakin tinggi kejelasan informasi yang dibagikan pemerintah melalui platform daring, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mengawasi kegiatan pemerintah.

Analisis mengenai pelaksanaan e-government yang bertujuan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pertiwi dkk (2021), menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital melalui situs web pemerintah dapat meningkatkan visibilitas informasi publik dan meningkatkan akses warga terhadap

layanan pemerintah. Azizah & Kholifah (2023), menjelaskan bahwa transparansi yang baik dalam informasi publik dapat mendorong keterlibatan publik yang lebih besar dan memperkuat kredibilitas pemerintah di kalangan masyarakat.

Penelitian oleh Hamzah et al. (2024), yang berfokus pada kejelasan penganggaran publik menunjukkan bahwa keterbukaan data keuangan dari pemerintah daerah mempengaruhi peningkatan kepercayaan warga terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, sebuah studi tentang pelaksanaan strategi pengadaan elektronik oleh Zaenudin & Setyowati (2025), mengenai adopsi metode pengadaan elektronik menunjukkan bahwa pemanfaatan platform online dalam fungsi pemerintahan berpotensi meningkatkan transparansi dan tanggung jawab kepada warga negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana transparansi digital memengaruhi peningkatan akuntabilitas publik melalui pengelolaan data publik pada situs web resmi pemerintah daerah. Selain itu juga bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan berbagi informasi publik digital dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengelola situs web pemerintah daerah sebagai alat untuk mendorong keterbukaan serta akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN

Strategi kualitatif dengan teknik deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Strategi kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang konsep transparansi digital guna meningkatkan akuntabilitas publik dengan mengelola informasi publik secara efektif di situs web pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Teknik deskriptif dipilih untuk memberikan ringkasan terstruktur tentang bagaimana informasi publik digital diungkapkan dan untuk menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengawasi situs web pemerintah daerah sebagai alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas publik.

Objek penelitian terdiri atas lima website resmi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang dipilih memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan objek penelitian meliputi: (1) website merupakan portal resmi pemerintah daerah yang masih aktif dan dapat diakses oleh publik; (2) website menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (3) website memiliki menu atau layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau informasi publik; serta (4)

website memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, objek penelitian meliputi website resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metodologi yang menyelidiki kondisi inheren suatu subjek. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena sosial melalui sudut pandang subjek yang diteliti. Studi ini meneliti situs web resmi pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai saluran untuk berbagi informasi dengan warga. Studi ini menekankan pengelolaan informasi publik melalui situs web pemerintah daerah tersebut, khususnya menyangkut aspek-aspek seperti transparansi informasi, kemudahan akses, ketepatan waktu, dan bagaimana situs web ini berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas publik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap situs web resmi pemerintah daerah dan dokumentasi berbagai informasi publik yang tersedia di situs web tersebut. Pengamatan dilakukan dengan

melihat seberapa lengkap informasi publik, seberapa sering informasi tersebut diperbarui, seberapa mudah aksesnya, seberapa transparan layanan publiknya, dan seberapa baik situs web tersebut berkomunikasi dengan publik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, undang-undang dan peraturan, dan dokumen lain yang relevan.

Instrumen observasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator keterbukaan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teori akuntabilitas publik menurut Mark Bovens (2007), serta penelitian terdahulu mengenai transparansi digital pada website pemerintah daerah. Observasi difokuskan pada lima indikator utama, yaitu: (1) ketersediaan profil pemerintah daerah; (2) informasi berita daerah; (3) publikasi laporan keuangan daerah; (4) pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan (5) layanan pengaduan masyarakat. Kelima indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana website pemerintah daerah mendukung transparansi digital dan akuntabilitas publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan Digital Terhadap Pengelolaan Informasi Publik pada Website Pemerintah Daerah

Kemajuan dalam teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi platform digital dalam berbagi informasi publik dengan warga. Salah satu contoh pergeseran menuju tata kelola digital adalah penggunaan situs web resmi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan memfasilitasi komunikasi dengan publik. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas daerah website pemerintah pengembangan sarana publikasi kegiatan pemerintahan menjadi instrumen penting.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap pengelolaan situs web resmi pemerintah daerah (Tabel 1), ditemukan adanya implementasi transparansi digital. Hal ini terlihat dari ketersediaan berbagai informasi publik, yang meliputi profil pemerintah daerah, rincian tentang inisiatif pembangunan, deskripsi layanan publik, laporan kegiatan, berita daerah, dan data terkait pengelolaan anggaran daerah.

Keberadaan informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 1
 Website Publik Pemerintah Daerah

Pengamatan	Kondisi Website	Keterangan
Profil Pemerintah Daerah	Tersedia	Memuat visi, misi, struktur organisasi
Informasi Berita Daerah	Aktif	Informasi diperbarui secara berkala
Laporan Keuangan Daerah	Kurang Optimal	Beberapa dokumen belum diperbarui
Pelayanan Informasi Publik (PPID)	Tersedia	Dokumen publik belum lengkap
Layanan Pengaduan Masyarakat	Belum Interaktif	Komunikasi dua arah masih terbatas

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa implementasi transparansi digital pada website pemerintah daerah telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan

informasi publik. Permasalahan utama yang ditemukan adalah kurang optimalnya pembaruan informasi serta belum maksimalnya layanan komunikasi publik berbasis digital.

Berdasarkan hasil observasi, seluruh website pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian telah menyediakan informasi dasar mengenai profil pemerintah daerah, seperti visi, misi, struktur organisasi, serta informasi mengenai perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan website resmi sebagai media penyampaian informasi dasar kepada masyarakat.

Pada indikator informasi berita daerah, seluruh website secara umum menunjukkan pembaruan informasi yang cukup baik. Berita mengenai kegiatan kepala daerah, pelayanan publik, dan program pembangunan diperbarui secara

Tabel 2
 Hasil Observasi Website Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo

Pemerintah Daerah	Profil	Berita	Laporan Keuangan	PPID	Pengaduan
Provinsi Gorontalo	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Gorontalo	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Gorontalo	✓	✓	△	✓	△
Kabupaten Bone Bolango	✓	✓	△	△	△
Kabupaten Boalemo	✓	✓	△	△	△

Keterangan:

✓ = tersedia dan aktif

△ = tersedia tetapi belum optimal

X = tidak tersedia

berkala sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai aktivitas pemerintahan.

Namun demikian, pada indikator laporan keuangan daerah masih ditemukan perbedaan tingkat keterbukaan informasi. Website Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo telah menyediakan dokumen keuangan dan laporan kinerja secara lebih lengkap, sedangkan beberapa pemerintah kabupaten masih menampilkan dokumen yang belum diperbarui atau belum tersedia secara lengkap. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi transparansi digital pada aspek informasi keuangan belum sepenuhnya merata.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa menu Pelayanan Informasi Publik (PPID) telah tersedia pada sebagian besar website pemerintah daerah. Akan tetapi, kelengkapan dokumen informasi publik masih berbeda pada setiap daerah. Beberapa website telah menyediakan daftar informasi publik, standar pelayanan informasi, serta mekanisme permohonan informasi, sementara website lainnya masih menampilkan informasi yang terbatas.

Pada indikator layanan pengaduan masyarakat, hanya sebagian website yang telah menyediakan media komunikasi yang bersifat interaktif. Beberapa pemerintah daerah telah mengintegrasikan layanan

pengaduan berbasis digital, sedangkan daerah lainnya masih menyediakan layanan berupa nomor kontak atau surat elektronik sehingga interaksi dua arah dengan masyarakat belum berlangsung secara optimal.

Kekhawatiran mengenai transparansi digital pada situs pemerintah daerah juga didukung oleh statistik nasional tentang penyebaran informasi publik. Seperti yang dinyatakan dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 yang dirilis oleh Komisi Penerangan Pusat, pelaksanaan penyebaran pemberitahuan pada masyarakat di Indonesia masih diklasifikasikan sebagai "sedang".

Tabel 3
Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Variabel	Skor
Skor Nasional IKIP	75,65
Transparansi informasi Publik	72,18
Dukungan Anggaran Informasi Publik	69,37
Ketersediaan Informasi Publik	75,62

Sumber: Komisi Informasi Pusat, (2024)

Informasi tersebut mendapati bahwa pelaksanaan penyebaran informasi publik di Indonesia belum mencapai potensi penuhnya. Peringkat yang kurang memadai pada indikator dukungan anggaran dan transparansi informasi mendapati bahwa terdapat berbagai tantangan saat menangani informasi publik digital, khususnya pada situs web pemerintah daerah.

Penerapan Akuntabilitas Publik Melalui Website Pemerintah Daerah

Dari sudut pandang Mark Bovens (2007), akuntabilitas di sektor publik mewakili hubungan antara pejabat pemerintah dan warga negara sebagai audiens kolektif, di mana pihak berwenang harus berbagi detail, klarifikasi, dan bertanggung jawab atas aktivitas mereka. Situs web pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong akuntabilitas publik dengan menawarkan informasi yang dapat diakses oleh semua orang. Data mengenai inisiatif pemerintah, dokumen pengembangan masyarakat, detail keuangan, dan penawaran layanan publik memungkinkan warga untuk mengawasi bagaimana tindakan pemerintah daerah dilaksanakan. Menurut Darmawan et al. (2022), pemerintah daerah dalam menjalankan akuntabilitas sebagai instrumen yang wajib dipertanggungjawabkan atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi dari suatu organisasi.

Temuan lain yang dilakukan oleh Hanasi (2024), mengemukakan bahwa, pemanfaatan terhadap teknologi informasi penting dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas administrasi publik. Ketersediaan platform daring dan saluran informasi yang mudah diakses menyederhanakan kemampuan individu untuk memperoleh berbagai detail tentang

kebijakan dan inisiatif pemerintah. Hal ini mendorong keterbukaan dalam operasi pemerintah dan meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

Tantangan Transparansi Digital Dalam Pengelolaan Informasi Publik

Keterbukaan digital pada situs web resmi pemerintah daerah terus mendapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penyebaran informasi pada publik. Meskipun banyak pemerintah daerah telah mengadopsi situs web untuk mengkomunikasikan informasi kepada publik, cara pengelolaannya masih belum memadai dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.

Ketidakkonsistenan pembaruan informasi publik dapat diamati di situs web pemerintah daerah. Beberapa detail yang dapat diakses di platform ini seringkali tidak diperbarui sebagaimana mestinya, terutama mengenai laporan kegiatan, laporan keuangan untuk wilayah tersebut, dan informasi tentang proyek pembangunan. Kondisi ini menjadikan informasi yang tersedia menjadi kurang relevan dengan kondisi aktual sehingga masyarakat mengalami kesulitan memperoleh data terbaru terkait kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah.

Ketersediaan staf untuk mengawasi situs web pemerintah daerah terbatas.

Mengelola informasi publik dalam format digital membutuhkan individu yang ahli dalam teknologi informasi, administrasi data, dan layanan informasi publik.

Permasalahan lain yang dicatat adalah kurangnya materi informasi publik yang lengkap di situs web resmi pemerintah daerah. Berbagai berkas penting, termasuk laporan pencapaian pemerintah, dokumentasi realisasi anggaran, rencana pembangunan, dan peninjauan program, belum sepenuhnya dapat diakses di situs web resmi lembaga pemerintah daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengungkapan informasi publik digital belum sepenuhnya sesuai dengan standar transparansi yang diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengungkapan Informasi Publik.

Analisis Transparansi Digital Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam situasi ini, situs web pemerintah di tingkat lokal memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi informasi publik melalui sarana digital. Hal ini didukung lebih lanjut oleh pandangan

Ardelia dan Yuadi yang disajikan dalam Santoso (2025), yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat memfasilitasi transparansi dengan memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah dan bebas memperoleh akses ke data pemerintah, seperti dokumen anggaran dan hasil kebijakan yang dibagikan di platform internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi publik melalui situs web pemerintah daerah terus berlanjut, meskipun belum mencapai efisiensi penuh. Beberapa informasi publik masih tampak parsial dan belum dilakukan pembaruan secara berkala. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik ideal penyebaran informasi masyarakat belum sepenuhnya tercapai terhadap pengelolaan situs web pemerintah daerah.

Lebih lanjut lagi, keterbukaan digital juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan aspek keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Situs web yang tertata rapi, mudah digunakan, dan dipelihara dengan baik dapat membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Sebaliknya, pengelolaan informasi publik yang buruk dapat mengurangi transparansi dan mempersulit masyarakat untuk

mengikuti perkembangan yang dilakukan pemerintah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Hasil akhir penelitian tentang bagaimana keterbukaan digital memengaruhi akuntabilitas publik melalui manajemen informasi di situs web pemerintah daerah, menunjukkan bahwa transparansi digital sangat penting dalam memfasilitasi penyebaran informasi publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dengan menggunakan situs web resmi pemerintah daerah sebagai saluran informasi publik, warga dapat mengakses detail pemerintahan dengan lebih efisien, efektif, dan terbuka. Kejelasan informasi mengenai inisiatif pemerintah, layanan publik, hasil kegiatan, dan informasi tentang pembangunan daerah membuat komitmen pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi standar penyebaran informasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Yamanda & Marianata (2024) yang mendapati bahwa teknologi informasi sangat efektif dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pada pemerintahan daerah.

Selain itu, situs web pemerintah berfungsi sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas publik, meningkatkan hubungan akuntabilitas antara pemerintah

dan warganya, seperti yang dijelaskan dalam kerangka teoritis Mark Bovens (2007). Ketersediaan informasi yang jelas melalui platform online memungkinkan warga untuk mengawasi tindakan dan efektivitas pemerintah daerah, sehingga meningkatkan keterlibatan warga dalam sistem pemerintahan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kejelasan digital dan tanggung jawab warga di situs web pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan standar administrasi situs resmi mereka dengan secara konsisten memperbarui data publik, sehingga warga bisa mendapat informasi terbaru dan akurat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan peningkatan pada aspek SDM khususnya dalam bidang pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan informasi pada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan pembaruan fitur komunikasi publik yang lebih interaktif di website resmi agar dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah juga perlu melengkapi ketersediaan dokumen informasi publik yang ditampilkan pada website resmi guna mendukung keterbukaan informasi secara menyeluruh. Selain itu, investigasi mendatang

diharapkan dapat memperluas eksplorasi transparansi digital melalui strategi yang lebih rinci, termasuk penilaian komparatif antar pemerintah daerah, mengevaluasi efisiensi situs web pemerintah kota, dan menganalisis pengaruh transparansi digital terhadap kepercayaan warga pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, kajian terkait transparansi digital dan tanggung jawab masyarakat dapat terus berkembang sesuai dengan lanskap tata kelola digital yang berubah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, D. N., & Kholifah, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik. *Pubmedia Sosial Sciences and Humanities*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.117>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Darmawan, D., Yazid, H., & Bastian, E. (2022). Peran Karakteristik Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(2), 112–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i2.191>
- Hamzah, M., Surahman, F., Abdurahman, Imam, A., Saputri, E., & Basyarahil, A. (2024). Transparansi Anggaran Publik Sebagai Kunci Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 199–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1891>
- Hanasi, R. A. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Modernisasi Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 2(1), 64–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.61787/asjcz804>
- Indonesia, A. P. J. I. (2024). *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. APJII. <https://web.apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39094/uu-no-14-tahun-2008>
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata kelola Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508>
- Programme, U. N. D. (1997). *Governance and Sustainable Human Development*. UNDP. https://digitallibrary.un.org/record/130207/files/DP_NDP_1997-11-UN.pdf
- Pusat, K. I. (2024). *Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024*. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

<https://komisiinformasi.go.id/read/17/10/2024/Komisi-Informasi-Pusat-Rilis-Hasil-IKIP-2024%2C-Kenaikan-Skor-jadi-Momentum-Dorong-Keterbukaan>

Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal Of Public Administration Review*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>

Yamanda, S. E., & Marianata, A. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Kumaniora Dan Seni*, 3(2), 797–800.

Zaenudin, A., & Setyowati, Y. (2025). Implementasi Kebijakan E-Procurement dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Magelang. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 294–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1891>